

Pemprov DKI Diminta Segera Atasi Permasalahan Kemacetan di Jakarta

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bisa menyelesaikan persoalan kemacetan di Ibu Kota.

Menurut Gilbert, Pemprov DKI Jakarta harus bisa memanfaatkan anggaran penanganan kemacetan Rp 6,9 triliun atau 10 persen dari total anggaran belanja daerah tahun 2024.

"Iya, Karena saya bingung, (apabila) Rp6,9 miliar dikurangkan tapi masih macet. Kan macet itu cerita yang sangat lama dari zaman orde baru di Jakarta," kata Gilbert saat dihubungi, Jumat (17/11).

Gilbert juga menyorot kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang dianggap tidak memiliki konsep penyelesaian masalah yang terjadi di Ibu Kota.

"Pj Gubernur sekarang ini konsepnya tidak terlalu jelas. Dia mau ngapain. Dia tidak punya target, karena dia (jadi Pj Gubernur) kan ditunjuk (Presiden Jokowi)," kata Gilbert.

Semestinya, kata Gilbert, Heru Budi dapat menyelesaikan kemacetan di Jakarta dengan fokus memperbaiki fasilitas transportasi publik di jalan protokol.

"LRT Jakarta kemarin disambungkan ke Manggarai. Tapi ini hanya untuk penumpang yang ada di kereta. Artinya mendukung warga non DKI. Sedangkan

itu (pembangunan) menggunakan dana APBD, sehingga dianjurkan untuk diteruskan ke pengguna murni warga DKI, ini kan pajak mereka," ucap Gilbert.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin meminta Pemprov DKI menggenjot anggaran penanganan macet di Ibu Kota tepat sasaran. Penanganan kemacetan di Jakarta masuk dalam program prioritas Pemprov DKI di 2024.

DPRD DKI telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 senilai Rp 81,71 triliun.

"Untuk penanganan macet, anggaran ini betul-betul (harus) tepat sasaran dan macet dapat berkurang," kata Khoirudin dalam keterangannya, Rabu (15/11).

Khoirudin mengatakan, DPRD akan mengawasi sejumlah program prioritas Pemprov DKI pada tahun depan. Ada enam program prioritas Pemprov DKI yang bersentuhan langsung dengan warga di Ibu Kota.

Program prioritas itu, yakni penanganan banjir, kemacetan, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, dan penguatan nilai demokrasi.

"Kita monitor penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang diajukan Pemprov," ujar Khoirudin. ● yan

Halte Cawang UKI Berganti Nama Jadi Cawang Central

JAKARTA (IM) - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bakal mengubah nama Halte Cawang UKI menjadi Halte Cawang Central dalam waktu dekat. Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza mengatakan, secara resmi perubahan nama akan dilakukan begitu revitalisasi Halte UKI rampung.

"Namanya nanti kami ubah menjadi Cawang Central. Jadi saat beroperasi kembali nanti, halte ini sudah bisa disebut sebagai Halte Cawang Central," ujar dia kepada wartawan saat site visit ke Halte Cawang Central, Jakarta Timur, Jumat (17/11).

Welfizon mengungkap perubahan nama dilakukan karena Halte Cawang Central bakal menjadi salah satu halte terbesar di Ibu Kota.

Selain itu, Halte Cawang Central akan menjadi peng-

hubung beberapa koridor sehingga disematkan nama "central".

"Cawang Central ini salah satu halte terbesar di timur Jakarta dan menjadi epicentrum dari beberapa rute yang cukup padat, ada sekitar 12 rute yang melintas. Makanya itu jadi salah satu alasan kami melakukan perubahan nama," tutur dia.

Welfizon juga menjelaskan perihal progres revitalisasi yang saat ini masih berlangsung.

Ia menyebutkan, progres revitalisasi halte kini sudah mencapai lebih dari 50 persen. Oleh karena itu, Halte Cawang Central diprediksi bakal mengangkut penumpang kembali pada pengujung tahun ini.

"Progresnya sudah 65-70 persen. Targetnya akhir tahun nanti sudah bisa dioperasikan," tutur dia. ● yan

Warga Lapor Parkir Liar di Tempat Ibadah, Kapolres Jakut Janji Tangani

JAKARTA (IM) - Warga Jakarta Utara melaporkan adanya parkir liar di depan gereja di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kapolres Jakut, Kombes Gidion Arif Setyawan langsung memerintahkan anggotanya untuk mengecek ke lokasi guna mengatasi masalah itu.

Curhatan itu disampaikan warga bernama Anton dalam Jumat Curhat bersama Kapolres Jakut. Curhatan Anton dibacakan oleh host karena yang bersangkutan tak bisa hadir secara live.

"Kiranya ditertibkan, Pak, petugas parkir liar selalu muncul tiap hari Minggu pada saat ibadah Minggu di GBI Mawar Saron di Jalan Kelapa Hybrid Timur, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakut. Mengam munculnya petugas parkir liar ini hanya hari Minggu saja, kalau nggak dikasih uang mukanya masam, Pak," demikian curhatan Anton yang dibacakan host detikPagi, Jumat (17/11).

Kapolres Jakut, Kombes Gidion mengatakan akan mengerahkan Kapolsek dan Satlantas untuk mengecek ke lokasi. Dia memastikan polisi akan memberikan kenyamanan kepada warga yang beribadah.

"Ini event-event tertentu ya, pada saat ke gereja, tapi nanti saya akan inikan dengan Kapolsek dan Satlantas datang ke lokasi, kemudian semaksimal mungkin memberikan pelayanan untuk kelancaran warga beribadah," kata Kombes Gidion.

Gidion menambahkan bahwa polisi akan berdiskusi dengan tukang parkir itu. Dia mengatakan penindakan akan dilakukan secara humanis.

"Ini kan cara bertindaknya sangat preventif, termasuk dengan petugas parkir tadi, kita akan kumpulkan, kita berikan pemahaman, itu dari luar atau dari masyarakat sekitar. Itu kita beri pemahaman," sebut dia. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANTARA



PROGRES REVITALISASI HALTE CAWANG CENTRAL

Pekerja menyelesaikan revitalisasi Halte Cawang Central di Jakarta, Jumat (17/11). Progres pengerjaan revitalisasi Halte Cawang Central yang berlokasi tepat di depan Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu telah mencapai 65-70 persen dan ditargetkan pada akhir tahun 2023 sudah bisa beroperasi.

2,4 Juta Warga DKI Ternyata Tinggal di Luar Ibu Kota

Berdasarkan data kependudukan, ada 11,3 juta penduduk yang terdaftar di DKI Jakarta. Namun, faktanya hanya sekitar 8,9 juta penduduk yang berdomisili di Jakarta. "Sisanya tidak berdomisili di Jakarta. Ini menjadi kendala dalam memberikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Akan ada potensi tidak tepat sasaran.

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta bersama Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) menjalin kerja sama sebagai upaya mengatasi persoalan demografi di ibu kota. Harapannya, kebijakan demografi dan kependudukan yang erat kaitannya dengan urusan sosial dapat menjadi lebih tepat sasaran.

Kodim 0501/JP Gelar Upacara Bendera 17-an



JAKARTA (IM) - Mayor Inf Endra Krimanto selaku Pasi Pers Kodim 0501/JP bertindak sebagai Inspektur Upacara 17-an, bertempat di JL. Selaparang Blok B.11 Kav 1, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, (17/11) pagi.

Bertindak sebagai Komandan Upacara, Kapten Inf Zulhamsah Siregar yang dalam kesehariannya menjabat sebagai Wadanramil 08/Johar Baru. Juga hadir Danramil jajaran Kodim 0501/JP, Perwira staf, anggota militer serta PNS Kodim 0501/JP.

Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin dan setiap tanggal 17 dengan maksud menanamkan disiplin keprajuritan serta mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Di samping itu pula guna mengimplementasikan sakti aji yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sebagai aparat kewilayahan," ungkap Pasi Pers. "Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan serta umur panjang dalam pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai," tutup Pasi Pers. ● ber

FOTO: ANTARA



PEMBANGUNAN DEPOK OPEN SPACE

Foto udara pembangunan ruang terbuka Depok Open Space di Kota Depok, Jumat (17/11). Pemkot Depok membangun ruang terbuka Depok Open Space seluas 2.444 meter persegi di depan Balai Kota Depok yang akan dilengkapi fasilitas dua tribun, panggung, perpustakaan mini, taman bermain anak, dan taman air mancur.

Jakarta, Joko Agus Setyono, mengungkapkan berdasarkan data kependudukan, ada 11,3 juta penduduk yang terdaftar di DKI Jakarta. Namun, faktanya hanya sekitar 8,9 juta penduduk yang berdomisili di Jakarta.

"Sisanya tidak berdomisili di Jakarta. Ini menjadi kendala dalam memberikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Akan ada potensi tidak tepat sasaran," ujar Joko.

Atas dasar itulah kerja sama dengan Lembaga Demografi UI dijalin. Pemprov DKI Jakarta memerlukan masukan guna merumuskan kebijakan yang dapat mengontrol pendataan dan pendaftaran penduduk secara de facto.

Dalam implementasi tersebut, upaya mewujudkan ter-

tib administrasi kependudukan dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Kerja sama ini dilakukan melalui penerapan kebijakan penonaktifan sementara NIK bagi penduduk yang secara de facto sudah tidak lagi berdomisili di wilayah DKI Jakarta selama satu tahun.

Ia mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa transformasi Jakarta menuju kota global memiliki berbagai tantangan, salah satunya adalah aspek data kependudukan karena Jakarta menempati urutan ke-70 kota terpadat di dunia.

Permasalahan kependudukan yang dihadapi antara lain adalah tren peningkatan jumlah penduduk pendatang setiap tahun dan karakteristik penduduk pendatang yang umumnya memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan rendah. Jika tidak ditangani dengan tepat, maka berpotensi menjadi persoalan perkotaan, seperti kemiskinan ekstrem, stunting di wilayah kumuh, dan sebagainya. ● yan

BPBD Kab. Bekasi Siaga Antisipasi Banjir Hingga Puting Beliung

BEKASI (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mulai bersiaga untuk mengantisipasi datangnya musim penghujan.

Kesiapsiagaan tersebut rupanya dibentuk dengan menyiapkan personel tim kebencanaan hingga tingkat desa.

Persiapan yang dibutuhkan di antaranya menyiapkan prasarana seperti perahu karet, logistik, pompa air dan lainnya juga disiagakan.

"Kita bersama bergerak di lapangan, dengan relawan hingga tingkat desa, untuk mengantisipasi resiko bencana banjir, saat musim penghujan nanti," ujar Kepala Bidang (Kabd) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi dalam keterangannya, Jumat (17/11).

Curah hujan yang tinggi rupanya menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah titik di Kabupaten Bekasi. Diungkapkan Dodi, banjir pada tahun lalu bahkan termasuk parah dan kini dibutuhkan antisipasi dan koordinasi.

Langkah untuk meng-

antisipasi adanya banjir dibutuhkan pembenahan infrastruktur.

Pembenahan itu nantinya antisipasi jauh lebih maksimal dan dapat dikendalikan.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan para relawan kebencanaan. "Kami sudah mengimbau, untuk membersihkan saluran air, agar saat curah hujan tinggi saluran air sudah tidak mampet. Dengan mengalirnya air di saluran yang sehat, akan menghindari banjir," ungkapnya.

Selain itu perlu diwaspadai datangnya hujan disertai angin kencang. Ia mengatakan November ini telah menerima laporan terjadinya angin puting beliung di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi.

"Dari laporan yang diterima BPBD Kabupaten Bekasi, laporan puting beliung terjadi di wilayah Kecamatan Bojongsung dan Karangbahagia. Sementara, dari hujan deras yang terjadi di pekan pertama November 2023, hujan dengan intensitas tinggi tidak menimbulkan genangan, kondisinya masih terpantau aman," pungkasnya. ● yan

PT EMP DAYA NUSANTARA Berkedudukan di Jakarta ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN

Bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal 17 November 2023, para pemegang saham Perseroan telah setuju untuk melakukan konversi sebagian utang Perseroan kepada PT EMP Tunas Persada selaku pemegang saham Perseroan, berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang antara Perseroan dan PT EMP Tunas Persada tanggal 31 Januari 2023 dan tanggal 31 Oktober 2023, menjadi setoran atas penambahan modal disetor dan ditempatkan PT EMP Tunas Persada sebagai pemegang saham Perseroan. Dengan demikian nilai keseluruhan penambahan modal disetor dan ditempatkan yang dilakukan oleh PT EMP Tunas Persada melalui konversi utang adalah sebesar Rp. 149.750.000.000,00 atau 2.995.000 lembar saham. Setelah penambahan tersebut, maka modal disetor dan ditempatkan Perseroan menjadi senilai Rp. 150.000.000.000,00 atau 3.000.000 lembar saham. Bahwa pengkonversian utang Perseroan menjadi saham tersebut dilakukan dengan maksud untuk peningkatan modal Perseroan. PEMBERITAHUAN ini dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 18 November 2023
Direksi PT EMP Daya Nusantara

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILIAHAN

Dengan ini diumumkan bahwa saham PT. NARAYANA KECIL SARI ("Perseroan") direncanakan akan diambil alih oleh investor baru. Pihak manapun yang berkepentingan atas pengambilalihan ini dapat menghubungi Perseroan dalam waktu yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku di alamat di bawah ini.

Jakarta, 18 November 2023

PT. NARAYANA KECIL SARI

Gedung SOHO Capital @Podomoro City Lantai 16 Unit 16.06A,
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILIAHAN

Dengan ini diumumkan bahwa saham PT. SURANAYA APIDAM ("Perseroan") direncanakan akan diambil alih oleh investor baru. Pihak manapun yang berkepentingan atas pengambilalihan ini dapat menghubungi Perseroan dalam waktu yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku di alamat di bawah ini.

Jakarta, 18 November 2023

PT. SURANAYA APIDAM

Gedung SOHO Capital @Podomoro City Lantai 16 Unit 16.06A,
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470